

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENOH SUHARTO PRANOTO**
2. Jabatan : **ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS**
3. NHK : **184793**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.559.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/70 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 983 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.179.000.000
4. Tanah Seluas 510 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Bangunan Seluas 33 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 820 m2 di CIANJUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 3250 m2 di CIANJUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 70.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 208.000.000****D. SURAT BERTAHAPAN** **Rp. ----**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 244.374.193 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 5.081.374.193 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 5.081.374.193 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.